

DETERMINAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Susanti Harahap¹, Darwis Harahap², Zulaika Matondang³

^{1,2,3} UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

^{1,2,3} Jl. T. Rizal Nurdin, Km. 4,5 Sihitang – Kota Padangsidempuan

E-mail : susantiharahap23@gmail.com¹, Darwisharahap@uinsyahada.ac.id²,

Zulaikamatondang@uinsyahada.ac.id³

ABSTRAK

Ketimpangan pembangunan merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang apabila tidak diatasi akan menimbulkan krisis yang lebih kompleks mencakup masalah ekonomi, sosial, politik, lingkungan dan juga dalam konteks makro dapat merugikan proses pembangunan yang ingin dicapai suatu wilayah. Ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut dapat menyebabkan beberapa hubungan keterlibatan bagi suatu wilayah, salah satunya adalah kecemburuan dan ketidakpuasan antar daerah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder melalui website www.bps.go.id. Populasi penelitian ini adalah data ketimpangan, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan indeks pembangunan manusia dengan jumlah sampel 30 dari tahun 2015-2019. Data penelitian ini diolah dengan menggunakan program *Eviews 10* dengan pengujian statistiknya menggunakan data panel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan dibuktikan dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,09506 > 1,70526$) yang berarti terdapat pengaruh antara pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pembangunan, jumlah penduduk memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pembangunan yang dibuktikan dengan nilai t_{tabel} ($8,400255 > 1,70526$) yang artinya jumlah penduduk berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan, dan indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan hal ini dibuktikan dengan nilai t_{tabel} ($-0,127998 < 1,70526$) yang artinya indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan, dengan nilai koefisien determinasi sebesar 76,16 persen artinya variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 76,16 persen dengan sisanya 23,84 persen dijelaskan oleh variabel lain artinya masih ada variabel lain yang dapat memengaruhi ketimpangan pembangunan.

Kata Kunci: Ketimpangan Pembangunan, Indeks Pembangunan Manusia, Jumlah Penduduk, dan Pertumbuhan Ekonomi.

ABSTRACT

Inequality in development is one of the economic problems which, if not resolved, will lead to a more complex crisis covering economic, social, political, environmental problems and also in the macro context can harm the development process that a region wants to achieve. This imbalance in development between regions can lead to several involvement relationships for a region, one of which is jealousy and dissatisfaction between regions. The formulation of

the problem in this study is whether there is an effect of economic growth, population, and human development index on development inequality in North Sumatra Province.

The type of research used in this research is quantitative research. The data used in this study is secondary data through the website www.bps.go.id. The population of this study is data on inequality, economic growth, population, and the human development index with a sample size of 30 from 2015-2019. The research data was processed using the Eviews 10 program with statistical tests using panel data.

The results showed that economic growth has no effect on inequality as evidenced by the value of $t_{count} > t_{table}$ ($2.09506 > 1.70526$) which means that there is an influence between economic growth on development inequality, the population has an influence on development inequality as evidenced by the t_{table} value ($8.400255 > 1.70526$) which means that the population has an effect on development inequality, and the human development index has no effect on development inequality. development, with a coefficient of determination of 76.16 percent, meaning that the independent variable is able to explain the dependent variable of 76.16 percent, with the remaining 23.84 percent explained by other variables, meaning that there are still other variables that can influence development inequality.

Keywords: Development Inequality, Human Development Index, Total Population, and Economic Growth.

PENDAHULUAN

Ketimpangan pembangunan merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang apabila tidak diatasi akan menimbulkan krisis yang lebih kompleks mencakup masalah ekonomi, sosial, politik, lingkungan dan juga dalam konteks makro dapat merugikan proses pembangunan yang ingin dicapai suatu wilayah. Ketimpangan ekonomi pembangunan ini disebabkan adanya perbedaan antar wilayah yaitu adanya wilayah yang maju dengan wilayah yang kurang maju. Menurut Kuncoro, ketimpangan mengacu pada standar hidup relatif dari seluruh masyarakat, sebab ketimpangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor anugerah awal. Perbedaan ini menyebabkan tingkat pembangunan di berbagai wilayah dan daerah berbeda-beda, sehingga menimbulkan jurang ketimpangan di berbagai wilayah tersebut.

Sumatera Utara merupakan provinsi di Indonesia yang terdiri dari 25 Kabupaten, 8 Kota, 444 Kecamatan, 693 Kelurahan, 51.497 Desa. Masing-masing wilayah tersebut memiliki perbedaan yang secara letak geografis dan potensi sumber daya alamnya sehingga memiliki pengaruh kuat terhadap terciptanya pembangunan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara tetapi menjadi tidak seragam sehingga menimbulkan kemampuan tumbuh yang berbeda. Kemampuan tumbuh yang berbeda ini pada akhirnya menyebabkan terjadinya ketimpangan baik pembangunan maupun hasilnya.

Cara menganalisis seberapa besarnya ukuran ketimpangan pendapatan antar wilayah bisa melalui perhitungan indeks Williamson. Berikut merupakan perkembangan Indeks Williamson di Provinsi Sumatera Utara tahun 2015-2019.

Tabel 1. Indeks Williamson Antar Wilayah Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Indeks Williamson
2015	0.021704
2016	0.022387
2017	0.022636
2018	0.022952
2019	0.023407

Sumber: *Data Diolah*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa indeks williamsom di Provinsi Sumatera Utara selama 5 tahun terakhir ketimpangan wilayah mengalami kenaikan setiap tahunnya dari tahun 2015-2019. Ketimpangan yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara berada dibawah 1, jika Indeks Williamson berada dibawah 1 artinya ketimpangan yang terjadi semakin mendekati tidak merata. Ini berarti menunjukkan ketimpangan di Provinsi Sumatera Utara semakin mendekati tidak merata.

Ada beberapa faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan pembangunan yaitu Jumlah penduduk, Inflasi, IPM, Investasi dan Pertumbuhan ekonomi. Adapun salah satunya yang memengaruhi ketimpangan pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar wilayah dan antar sektor. Suatu ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan yang berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi daripada yang di capai pada masa sebelumnya.

Salah satu keberhasilan dalam pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi. Dalam pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan pemerataan hasil pembangunan menjadi sasaran utama. Namun pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi menyebabkan ketimpangan pembangunan pada setiap daerah. Berikut merupakan tabel laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara Pada Tahun 2015-2019.

Tabel 2. Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2019

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Indeks Williamsom
2015	5,10	0.021704
2016	5,18	0.022387
2017	5,12	0.022636
2018	5,18	0.022952
2019	5,22	0.023407

Sumber: BPS

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara dalam beberapa waktu belakangan ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang cenderung naik turun atau berfluktuasi. Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,10 persen, sedangkan Indeks Williamsom sebesar 0.021704. kemudian pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 5,18 persen, sedangkan Indeks Williamsom sebesar 0.022387. Dan pada tahun 2017 Pertumbuhan Ekonomi mengalami penurunan sebesar 5,12 persen, sedangkan Indeks Williamsom mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 0.022636. Pada tahun 2018 Pertumbuhan Ekonomi kembali mengalami peningkatan sebesar 5,18 persen, sedangkan Indeks Williamsom mengalami peningkatan secara perlahan dari tahun sebelumnya sebesar 0.022952. Pada tahun 2019 Pertumbuhan Ekonomi mengalami peningkatan sebesar 5,22 persen, sedangkan Indeks Williamsom mengalami peningkatan lagi sebesar 0.023407.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan diantaranya adalah jumlah penduduk. Berikut merupakan tabel jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 3. Perkembangan Jumlah Penduduk di Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Indeks Williamsom
2015	13.937.797	0.021704
2016	14.102.911	0.022387
2017	14.262.147	0.022636
2018	14.451.391	0.022952
2019	14.562.549	0.023407

Sumber: BPS

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015-2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 jumlah penduduk sebesar 13.937.797 jiwa, sedangkan indeks williamsom sebesar 0.021704. Pada tahun 2016 jumlah penduduk meningkat sebesar 14.102.911 jiwa, indeks williamsom juga

meningkat sebesar 0.022387. Dan pada tahun 2019 jumlah penduduk mencapai 14.562.549 jiwa dan indeks williamsom sebesar 0.023407.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi tingginya ketimpangan adalah kondisi indeks pembangunan manusia. IPM yang tidak merata antar daerah menyebabkan daerah yang IPM-nya lebih tinggi akan memiliki kualitas manusia yang baik sehingga dapat menunjang pembangunan. Pembangunan ekonomi juga dapat dikatakan berhasil apabila suatu wilayah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata atau yang lebih dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Rendah atau tingginya IPM akan berdampak pada tingkat produktivitas penduduk, semakin rendah IPM maka tingkat produktivitas penduduk juga rendah akan berpengaruh pada rendahnya pendapatan, begitu pula sebaliknya semakin tinggi IPM maka akan semakin tinggi tingkat produktivitas penduduk yang kemudian mendorong tingkat pendapatan menjadi semakin tinggi. Permasalahan yang terjadi adalah IPM pada tiap daerah itu berbeda, hal ini menjadikan IPM salah satu faktor yang berpengaruh pada ketimpangan pendapatan antar wilayah.

Tabel 4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Williamsom
2015	69,51	0.021704
2016	70,00	0.022387
2017	70,57	0.022636
2018	71,18	0.022952
2019	71,74	0.023407

Sumber: BPS

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Williamsom di Provinsi Sumatera Utara. Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan setiap tahunnya pada tahun 2015 IPM sebesar 69,51 dan Indeks Williamsom sebesar 0.021704. Pada tahun 2016 IPM meningkat sebesar 70,00 dan Indeks Williamsom 0.022387. sebesar Pada tahun 2017 IPM juga mengalami peningkatam sebesar 70,57 dan Indeks Williamsom sebesar 0.022636. Pada tahun 2018 IPM sebesar 71,18 dan Indeks Williamsom sebesar 0.022952. Dan pada tahun 2019 IPM sebesar 71,74 dan indeks williamsom sebesar 0.023407.

Capaian kinerja indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara memang memiliki kecenderungan meningkat secara absolut. Namun peningkatan tersebut ternyata tidak cukup kuat untuk mengangkat possisi relatif Indeks Pembangunan Manusia ke level yang

diharapkan secara nasional. IPM yang semakin tinggi dan merata pada daerah tersebut dapat mendorong terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga akan menurunkan tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

Hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara cukup berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi tersebut. Diketahui bahwa IPM yang tinggi mendorong terjadinya ketimpangan pembangunan ekonomi. Bahwa dampak positif dari adanya ketimpangan adalah memacu persaingan antar daerah yang lebih baik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan ketimpangan distribusi pendapatan juga memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan

Berdasarkan latar belakang masalah ini, permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah menjadi permasalahan yang sering terjadi pada saat proses pembangunan. Adanya kerja keras yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan akan mewujudkan tujuan bersama yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini perlu adanya penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan pembangunan agar pemerintah bisa membuat kebijakan yang tepat untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut.

TINJAUAN TEORITIK

KETIMPANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH

Ketimpangan wilayah merupakan salah satu masalah yang pasti muncul dalam pembangunan wilayah. Tersedia cukup bukti yang bisa diajukan untuk menunjukkan betapa ketimpangan masih memprihatinkan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun bukti tersebut bisa terlihat dengan kasat mata dan dirasakan. Bermunculannya kawasan-kawasan kumuh (*slumps*) di tengah beberapa kota besar, serta sebaliknya di lain pihak hadirnya kantong-kantong permukiman mewah di tepian kota atau bahkan di daerah perdesaan, adalah bukti nyata ketimpangan yang langsung dapat kita saksikan dan rasakan. Perbedaan ini menyebabkan tingkat pembangunan diberbagai wilayah berbeda-beda sehingga menimbulkan jurang kesejahteraan diberbagai wilayah tersebut. Kesenjangan antar wilayah disebabkan karena adanya perbedaan faktor anugrah awal (*endowment faktor*). Kesenjangan antar wilayah disebabkan karena adanya perbedaan faktor anugrah awal (*endowment faktor*). dari ketidaksetaraan anugrah awal itu bersifat alamiah (*natural*) atau bahkan *ilahiah*. Akan tetapi

sebagian lagi bersifat structural. Katidaksetaran anugrah awal tersebut berakibat peluang dan harapan untuk berkiprah dalam pembangunan menjadi tidak seimbang.

PERTUMBUHAN EKONOMI

Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut juga oleh seberapa besar terjadi *transfer payment*, yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah atau mendapat aliran dana dari luar wilayah. Dalam ekonomi Islam pertumbuhan ekonomi yang dituju adalah pertumbuhan optimal, baik dari segi kesejahteraan materi maupun rohani, Islam tidak memperkenankan konsumsi modal dan pertumbuhan yang melampaui batas yang memaksakan pengorbanan yang tidak alamiah bagi manusia.

JUMLAH PENDUDUK

Jumlah penduduk dalam konteks pembangunan mempengaruhi belanja daerah, jumlah penduduk yang besar bagi pemerintah daerah dipandang sebagai asset modal dasar pembangunan atau sebagai pengacu pembangunan tetapi sekaligus juga sebagai penghambat pembangunan. Yang menjadi permasalahan dalam pertumbuhan penduduk adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menimbulkan berbagai masalah dan hambatan dalam pembangunan ekonomi. Dengan keadaan yang demikian dimungkinkan pertumbuhan penduduk akan menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah jika dalam penanganannya tidak bisa dilakukan dengan efektif.

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan ekonomi seharusnya juga dianalisis dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya. Terdapat empat pokok yang perlu diperhatikan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, yaitu: produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan. Indeks pembangunan manusia (IPM), secara khusus mengukur capaian pembangunan manusia menggunakan beberapa komponen dasar kualitas hidup. UNDP membagi status pembangunan manusia suatu negara atau wilayah kedalam tiga kategori berdasarkan nilai IPM pada tabel berikut:

Tabel 5. Kategori Nilai IPM

Nilai IPM	Keterangan
IPM < 60	Rendah
60 ≤ IPM < 70	Sedang/Menengah
70 ≤ IPM < 80	Tinggi
IPM ≥ 80	Sangat Tinggi

Nilai IPM suatu wilayah menunjukkan seberapa jauh wilayah tersebut telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat, dan tingkat pengeluaran serta konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak. Pembentukan modal manusia adalah suatu proses untuk memperoleh dan meningkatkan jumlah orang yang memiliki keahlian, pendidikan, dan pengalaman yang dapat menentukan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Oleh karena itu, pembentukan modal manusia dan pengembangannya sebagai sumber yang kreatif dan produktif.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan tiga variabel yang dianggap memengaruhi ketimpangan pembangunan ekonomi. Penelitian ini dilakukan mulai bulan September 2021 sampai Maret 2022. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dalam bentuk data berdasarkan pada runtutan waktu (*time series*) yaitu data yang secara kronologis disusun menurut perubahan dalam rentang waktu tertentu.

Adapun populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota dari tahun 2015-2019. Teknik pengambilan sampel adalah *purposive sampling*. Sampel didalam penelitian ini adalah Mandailing Natal, Gunung Sitoli, Asahan, Pakpak Bharat, Padang Lawas, dan Padang Lawas Utara. Sebanyak 6 kabupaten/kota selama 5 tahun, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 sampel. Data penelitian yang dihimpun melalui data sekunder, peneliti akan memperoleh gambaran yang lebih jelas dari permasalahan yang dihadapi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara data yang diambil peneliti bersumber dari BPS melalui website resmi www.bps.go.id. Sumber data terdiri dari pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara.

TEKNIK ANALISIS DATA

Untuk mendapatkan hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian maka perludilakukan teknik analisis data. Data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan program Eviews. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Statistik Deskriptif, Uji Normalitas, Uji Hipotesis, Uji Parsial (Uji t), Uji F , Uji Koefisien Determinasi (R²) dan Uji Regresi Berganda.

Adapun bentuk persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$KP_{it} = \alpha + b_1PE_{it} + b_2JP_{it} + b_3IPM_{it} + e$$

Keterangan:

KP	:Ketimpangan Pembangunan	IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
α	:konstanta	l	: Cross/wilayah
$b_1b_2b_3$:Koefisien	t	: Time/waktu
PE	:Pertumbuhan Ekonomi	e	: Standar Error
JP	:Jumlah Penduduk		

HASIL DAN PEMBAHASAN

DESKRIPSI VARIABEL PENELITIAN

Tabel 1. Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah di Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Mandailing Natal	Gunung Sitoli	Asahan	Pakpak Bharat	Padang Lawas	Padang Lawas Utara
2015	0,172848	0,098173	0,214328	0,057058	0,134099	0,132606
2016	0,172704	0,098202	0,214067	0,05727	0,134787	0,133182
2017	0,172542	0,098209	0,213749	0,057429	0,135552	0,133732
2018	0,172354	0,098251	0,213304	0,057685	0,136217	0,134221
2019	0,017222	0,098267	0,212973	0,057877	0,136919	0,13476

Sumber: Data BPS (diolah)

Berdasarkan tabel 1 terlihat bahwa ketimpangan pembangunan di Mandailing Natal, pada tahun 2015 sebesar 0,172848. Pada tahun 2016 ketimpangan pembangunan 0,172704, pada tahun 2017 sebesar 0,172542 pada tahun 2018 menurun menjadi 0,172354 dan pada tahun 2019 menurun kembali menjadi 0,017222. Ketimpangan pembangunan di Gunung Sitoli pada tahun 2015 sebesar 0,098173, pada tahun 2016 meningkat menjadi 0,098202 pada tahun

2017 meningkat menjadi 0,098209, pada tahun 2018 meningkat menjadi 0,098251 dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan kembali menjadi 0,098267.

Ketimpangan pembangunan di Asahan pada tahun 2015 sebesar 0,214328 pada tahun 2016 menurun menjadi 0,214067 pada tahun 2017 menurun menjadi 0,213749, pada tahun 2018 menurun menjadi 0,213304 dan pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali menjadi 0,212973. Ketimpangan pembangunan di Pakpak Bharat pada tahun 2015 sebesar 0,057058 pada tahun 2016 meningkat menjadi 0,05727 pada tahun 2017 meningkat menjadi 0,057429, pada tahun 2018 meningkat menjadi 0,057685 dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan kembali menjadi 0,057877.

Ketimpangan pembangunan di Padang Lawas pada tahun 2015 sebesar 0,134099 pada tahun 2016 meningkat menjadi 0,134787 pada tahun 2017 meningkat menjadi 0,135552, pada tahun 2018 meningkat menjadi 0,136217 dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan kembali menjadi 0,136919. Ketimpangan pembangunan di Padang Lawas Utara pada tahun 2015 sebesar 0,132606 pada tahun 2016 meningkat menjadi 0,1331182 pada tahun 2017 meningkat menjadi 0,133732, pada tahun 2018 meningkat menjadi 0,134221 dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan kembali menjadi 0,13476.

Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di suatu perekonomian. Kesejahteraan dan kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan *output* nasional.

Tabel 2. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara (Persen)

Tahun	Mandailing Natal	Gunung Sitoli	Asahan	Pakpak Bharat	Padang lawas	Padang Lawas Utara
2015	6,22	5,39	5,57	5,39	5,74	5,94
2016	6,18	6,03	5,62	5,97	6,06	5,96
2017	6,09	6,01	5,48	5,94	5,71	5,54
2018	5,79	6,03	5,61	5,85	5,96	5,58
2019	5,30	6,05	5,64	5,87	5,64	5,61

Sumber: BPS

Berdasarkan tabel 2. diatas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Mandailing Natal pada tahun 2015 sebesar 6,22 pada tahun 2016 menurun menjadi 6,18 pada tahun 2017 menurun menjadi 6,09 pada tahun 2018 menurun menjadi 5,79 pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali menjadi 5,30. Pertumbuhan ekonomi di Gunung Sitoli pada tahun 2015 sebesar 5,39 pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 6,03 pada tahun 2017

pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan menjadi 6,05 pada tahun 2018 meningkat menjadi 6,03 dan pada tahun 2019 meningkat kembali menjadi 6,05.

Pertumbuhan Ekonomi di Asahan pada tahun 2015 sebesar 5,57 pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 5,62 dan pada tahun 2017 menurun kembali menjadi 5,48 pada tahun 2018 meningkat menjadi 5,61 dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan kembali menjadi 5,64. Pertumbuhan ekonomi Pakpak Bharat pada tahun 2015 5,39 pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 5,97 dan menurun pada tahun 2017 dan 2018 menjadi 5,94 dan 5,85 dan meningkat kembali pada tahun 2019 menjadi 5,87.

Pertumbuhan Ekonomi Padang Lawas pada tahun 2015 5,94 pada tahun 2016 meningkat menjadi 5,96 dan menurun pada tahun 2017 menjadi 5,54 dan meningkat pada tahun 2018 dan 2019 menjadi 5,58 dan 5,61. Pertumbuhan Ekonomi Padang Lawas Utara pada tahun 2015 5,94 pada tahun 2016 meningkat menjadi 5,96 dan menurun pada tahun 2017 menjadi 5,54 dan meningkat pada tahun 2018 dan 2019 menjadi 5,58 dan 5,61.

Jumlah penduduk merupakan penghitungan cacah penduduk perorangan dalam suatu wilayah melalui sensus.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Utara (Jiwa)

Tahun	Mandailing Natal	Gunung Sitoli	Asahan	Pakpak Bharat	Padang Lawas	Padang Lawas Utara
2015	430.894	135.995	706.283	45.516	258.003	252.589
2016	435.303	137.693	712.684	46.392	263.784	257.807
2017	439.505	139.281	718.718	47.183	269.799	262.895
2018	443.490	140.927	724.379	48.119	275.515	267.771
2019	447.287	142.426	729.795	48.935	281.239	286.627

Sumber: BPS

Berdasarkan pada tabel IV.3 diatas terlihat bahwa jumlah penduduk di Mandailing Natal pada tahun 2015 sebesar 430.894 jiwa pada tahun 2016 meningkat menjadi 435.303 jiwa pada tahun 2017 meningkat menjadi 439.505 jiwa meningkat lagi pada tahun 2018 menjadi 443.490 jiwa dan meningkat kembali pada tahun 2019 menjadi 447.287 jiwa. Jumlah penduduk di Gunung Sitoli pada tahun 2015 sebesar 135.995 jiwa pada tahun 2016 meningkat menjadi 137.693 jiwa pada tahun 2017 meningkat menjadi 139.281 jiwa meningkat lagi pada tahun 2018 menjadi 140.927 jiwa dan meningkat kembali pada tahun 2019 menjadi 142.426 jiwa.

Jumlah penduduk di Asahan pada tahun 2015 sebesar 706.283 jiwa pada tahun 2016 meningkat menjadi 712.684 jiwa pada tahun 2017 meningkat menjadi 718.718 jiwa meningkat lagi pada tahun 2018 menjadi 724.379 jiwa dan meningkat kembali pada tahun 2019 menjadi

729.795 jiwa. Jumlah penduduk di Pakpak Bharat pada tahun 2015 sebesar 45.516 jiwa pada tahun 2016 meningkat menjadi 46.392 jiwa pada tahun 2017 meningkat menjadi 47.183 jiwa meningkat lagi pada tahun 2018 menjadi 48.119 jiwa dan meningkat kembali pada tahun 2019 menjadi 48.935 jiwa.

Jumlah penduduk di Padang Lawas pada tahun 2015 sebesar 258.003 jiwa pada tahun 2016 meningkat menjadi 263.784 jiwa pada tahun 2017 meningkat menjadi 269.799 jiwa meningkat lagi pada tahun 2018 menjadi 275.515 jiwa dan meningkat kembali pada tahun 2019 menjadi 281.239 jiwa. Jumlah penduduk di Padang Lawas Utara pada tahun 2015 sebesar 252.589 jiwa pada tahun 2016 meningkat menjadi 257.807 jiwa pada tahun 2017 meningkat menjadi 262.895 jiwa meningkat lagi pada tahun 2018 menjadi 267.771 jiwa dan meningkat kembali pada tahun 2019 menjadi 286.627 jiwa.

Secara khusus Indeks Pembangunan Manusia mengukur capaian pembangunan manusia menggunakan beberapa komponen dasar kualitas hidup.

Tabel 4. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Mandailing Natal	Gunung Sitoli	Asahan	Pakpak Bharat	Padang Lawas	Paluta Lawas Utara
2015	63,99	66,41	68,40	65,53	65,99	67,35
2016	64,55	66,85	68,71	65,81	66,23	68,05
2017	65,13	67,68	69,10	66,25	66,82	68,34
2018	65,83	68,33	69,49	66,63	67,59	68,77
2019	66,52	69,30	69,92	67,47	68,16	69,29

Sumber: BPS

Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Mandailing Natal pada tahun 2015 63,99 pada tahun 2016 meningkat menjadi 64,55 pada tahun 2017 meningkat menjadi 65,13 pada pada tahun 2018 dan 2019 juga mengalami peningkatan 65,83 dan 66,52. Indeks Pembangunan Manusia di Gunung Sitoli pada tahun 2015 66,41 pada tahun 2016 meningkat menjadi 66,85 dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 67,68 pada tahun 2018 dan 2019 juga mengalami peningkatan yaitu 68,33 dan 69,30

Indeks Pembangunan Manusia di Asahan pada tahun 2015 68,40 pada tahun 2016 meningkat menjadi 68,71 pada tahun 2017 meningkat menjadi 66,25 pada tahun 2018 dan 2019 juga meningkat yaitu 69,49 dan 69,92. Indeks Pembangunan Manusia di Pakpak Bharat pada 65,53 meningkat pada tahun 2016 menjadi 65,81 pada tahun 2017 meningkat menjadi 66,25 pada tahun 2018 meningkat menjadi 66,63 dan meningkat lagi pada tahun 2019 menjadi 67,47.

HASIL UJI HIPOTETIS

UJI PARSIAL (t)

Untuk hasil pengujian t dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.183730	0.112656	-1.630894	0.1150
PE?	0.042859	0.019398	2.209506	0.0362
JP?	2.02E-07	2.41E-08	8.400255	0.0000
IPM?	-5.58E-07	4.36E-06	-0.127998	0.8991

Sumber : Hasil Pengolahan *Output Eviews10*

Uji parsial diperoleh dari hasil output *eviews* antara lain t_{hitung} pertumbuhan ekonomi (PE?) sebesar 2,209506, jumlah penduduk (JP?) sebesar 8,400255 dan indeks pembangunan manusia (IPM?) sebesar -0,127998.

UJI F (SIMULTAN)

Pengujian ini menggunakan tingkat signifikan 0,05 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Simultan (Uji F)

R-squared	0.761657	Mean dependent var	0.130019
Adjusted R-squared	0.734156	S.D. dependent var	0.054641
S.E. of regression	0.028173	Akaike info criterion	-4.177331
Sum squared resid	0.020637	Schwarz criterion	-3.990505
Log likelihood	66.65997	Hannan-Quinn criter.	-4.117564
F-statistic	27.69551	Durbin-Watson stat	1.241960
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : *Output eviews 10*

Dari hasil output di atas dapat dijelaskan bahwa dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan F_{hitung} sebesar 27,69551. Tabel distribusi F dicari dengan derajat kebebasan (df 2) $n-k-1$ atau $30-3-1 = 26$ (n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel independen). Berdasarkan uji F di atas dilihat bahwa hasil uji F diperoleh F_{hitung} sebesar $27,69551 > 2,975 F_{tabel}$ maka dapat disimpulkan H_a diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara.

UJI KOEFISIEN DETERMINASI (R^2)

Hasil R^2 penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.761657	Mean dependent var	0.130019
Adjusted R-squared	0.734156	S.D. dependent var	0.054641

Sumber :Output Eviews 10

Dari hasil diatas menunjukkan besarnya koefisien determinasi adalah 0,761657 atau sama dengan 76,16 persen yang diambil dari R-Square. Artinya bahwa variabel independen (Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia) mampu menjelaskan variabel dependen (Ketimpangan Pembangunan) sebesar 76,16 persen sedangkan sisanya sebesar 23,84 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Artinya masih ada variabel lain yang mempengaruhi Ketimpangan Pembangunan.

ANALISIS REGRESI BERGANDA

Adapun hasil regresi linear berganda dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Regresi Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.183730	0.112656	-1.630894	0.1150
PE?	0.042859	0.019398	2.209506	0.0362
JP?	2.02E-07	2.41E-08	8.400255	0.0000
IPM?	-5.58E-07	4.36E-06	-0.127998	0.8991

Sumber :Output Eviews 10

Berdasarkan hasil uji Regresi Berganda diatas maka persamaan analisis regresi berganda penelitian ini adalah:

$KP = \alpha + b_1PE_{it} + b_2JP_{it} + b_3IPM_{it} + e$ model analisis regresi linear berganda antara variabel X terhadap variabel Y dapat di transformasikan dalam model persamaan berikut:

$$KP = -0,183730 + 0,042859 PE + 0,000000202 JP - 0,000000558 IPM + e$$

Dari hasil persamaan regresi linear berganda tersebut, masing-masing variabel dapat diinterpretasikan pengaruhnya terhadap ketimpangan pembangunan berikut:

- 1) Nilai konstanta sebesar (-0,183730) artinya jika nilai koefisien regresi variabel lainnya nol (0) maka koefisien Ketimpangan Pembangunan (Y) nilai negatif yaitu sebesar (-0,183730).
- 2) Koefisien Pertumbuhan Ekonomi (X_1) sebesar (0,042859) bernilai positif artinya jika pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka koefisien ketimpangan pembangunan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar (0,042859 - 0,183730 = -0,140871) dengan asumsi variabel lain nilainya tetap.

- 3) Koefisien Jumlah Penduduk (X_2) sebesar (0,000000202) artinya jika Jumlah Penduduk mengalami kenaikan 1 satuan, maka koefisien Ketimpangan Pembangunan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar $(0,000000202 - 183730 = -0,183729798)$ dengan asumsi variabel lain nilainya tetap.
- 4) Koefisien Indeks Pembangunan Manusia (X_3) sebesar (0,000000558) artinya jika Indeks Pembangunan Manusia mengalami kenaikan 1 satuan, maka koefisien Ketimpangan Pembangunan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar $(0,000000558 - 183730 = -0,1837230558)$ dengan asumsi variabel lain nilainya tetap.

Adapun penelitian ini berjudul Determinan Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Di Provinsi Sumatera Utara. Peneliti menggunakan analisis regresi linear berganda dengan tujuan untuk melihat bagaimana keadaan naik turunnya nilai variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor naik dan turunnya nilai variabel dependen tersebut. Jadi analisis regresi linear berganda dilakukan apabila jumlah variabel independennya dua atau lebih.

$$KP = -0,183730 + 0,042859 PE + 0,000000202 JP - 0,000000558 IPM.$$

Nilai konstanta sebesar -0,183730 menyatakan bahwa jika seluruh variabel independen ditiadakan maka nilai Ketimpangan Pembangunan sebesar -0,183730. Nilai koefisien regresi b_1 (variabel Pertumbuhan Ekonomi) bernilai positif sebesar 0,042859 artinya bahwa setiap bertambah Pertumbuhan Ekonomi maka Ketimpangan Pembangunan akan mengalami peningkatan sebesar 0,042859 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Sumatera Utara

Salah satu keberhasilan dalam pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi. Dalam pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan pemerataan hasil pembangunan menjadi sasaran yang utama, namun pada kenyataannya peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat menyebabkan penurunan ketimpangan pembangunan.

Dalam penelitian ini variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Ketimpangan Pembangunan, hal ini ditunjukkan dari hasil uji T bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki nilai $T_{hitung} > T_{tabel} = (2,09506 > 1,70526)$ artinya terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara.

Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Sumatera Utara. Pertumbuhan penduduk memang menjadi permasalahan dalam jangka panjang dimana peningkatan jumlah penduduk jika tidak sejalan dengan peningkatan jumlah lapangan pekerjaan maka dapat mengganggu pembangunan ekonomi. Akan tetapi menurut putong, jika pertumbuhan penduduk yang besar diikuti oleh tingkat produktivitas yang tinggi akan menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tingginya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kesejahteraan dan tingkat pendidikan dan pada akhirnya akan mampu memperbaiki mutu dan dan citra hidup.

Dalam penelitian ini variabel jumlah penduduk berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan, hal ini ditunjukkan dari hasil uji T bahwa jumlah penduduk memiliki nilai $T_{hitung} > T_{tabel} = (8.400255 > 1,70526)$ artinya terdapat pengaruh jumlah penduduk terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Sumatera Utara

Pembangunan ekonomi juga dikatakan berhasil dengan melihat taraf hidup masyarakat secara merata atau dikenal dengan indeks pembangunan manusia. Rendah atau tingginya IPM berdampak pada tingkat produktivitas penduduk, semakin rendah IPM maka tingkat produktivitas penduduk juga akan rendah, begitu pula sebaliknya semakin tinggi IPM maka akan semakin tinggi produktivitas penduduk yang kemudian mendorong tingkat pendapatan semakin tinggi.

Dalam penelitian ini Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan Pembangunan, hal ini ditunjukkan dari hasil uji t bahwa variabel Pembangunan Manusia memiliki nilai $T_{hitung} > T_{tabel} = (-0.127998. < 1,70526)$ artinya tidak terdapat pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dikarenakan tidak membaiknya secara signifikan peringkat indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara secara nasional disebabkan oleh pergerakan nilai indeks pembangunan manusia yang tidak cukup akseleratif. Bahkan beberapa dimensi pembentuk indeks pembangunan manusia menunjukkan nilai yang lebih rendah dibandingkan capaian nasional.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, dan Indeks Pembangunan Manusia dalam menilai kondisi Ketimpangan Pembangunan pada Wilayah Di Provinsi Sumatera Utara maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian iniyaitu. Terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara,

DAFTAR PUSTAKA

- Andri Devita, dkk. *"Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi"*, Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, Vol. 2, No. 2, Oktober 2014.
- Bella Febriantianingrum, *"Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Indeks Kebahagiaan di Indonesia tahun 2014 dan 2017"* Jurnal Universitas Pembangunan Nasional Veteran, 2020.
- Dumairy. *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Erlangga, 2018.
- Feni Nursetianingrum, *"Pengaruh jumlah penduduk, tenaga kerja, dan dana alokasi bantuan pembangunan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi Provinsi Lampung dalam perspektif ekonomi Islam tahun 2012-2016,"* 2018.
- Ikbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm.258.
- Kartika Dorcas Andhiani, dkk. *"Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan di Wilayah Sumatera 2011-2015"*, e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah, 2018.
- Kamal Idris, dkk. *"Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja, Kemiskinan, dan Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Riau"*, Jurnal Paradigma Ekonomika, Vol.9, No.1, 2014.
- Muhammad Haikal, *"Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah di Provinsi Sumatera Utara"*, 2020.
- Nita Tri Hartini, *"Pengaruh PDRB perkapita, Investasi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2015"*, Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2017.
- Mudrajad Kuncoro. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Robinson Tarigan, M.R.P, *Ekonomi Regional* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 46.
- Setiawan dan Dwi Endah Kusri. *Ekonometrika*. Yogyakarta: Andi, 2010.
- Sirojuzolam. *Regional: Pembangunan, Perencanaan dan Ekonomi*. Medan: USU Press, 2010.
- Sjafrizal. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Bandung: CV Alfabeta, 2012.
- Syofian Siregar, *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014)
- Yosi Eka Putri, dkk, *"Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Indonesia,"* 2017.